

Sejumlah Dokter Deklarasikan PDSI, Klaim Sudah Diakui Kemenkumham

Setelah heboh soal pro dan kontra pemecatan dokter Terawan oleh IDI, kini dideklarasikan PDSI yang disebut sudah ada SK dari Kemenkum HAM.

JAKARTA (IM) - Organisasi profesi kedokteran hampir dapat dipastikan bukan hanya IDI lagi. Sebab, sejumlah dokter pada Rabu (27/4) mendeklarasikan organisasi dokter yang baru bernama Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI). Deklarasi

digelar di Jakarta dan dipimpin Brigjen TNI (Purn) dr Jajang Edi Priyanto SpB MARS. "Pada hari ini, Rabu, 27 April 2022, izinkan kami dengan kerendahan hati untuk mendeklarasikan berdirinya Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia sesuai dengan

SK Kemenkumham Nomor AHU-003638.AH.01.07.2022 tentang Pengehangan Pendirian Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia." ujar Jajang, dilansir dari siaran pers PDSI, Rabu (27/4).

Dia menjelaskan, berdirinya perkumpulan ini dalam rangka memenuhi hak warga negara Indonesia dalam berserikat dan berkumpul yang dijamin Pasal 28 UUD 1945 selaku konstitusi tertinggi di NKRI. Hak tersebut pun menurut Jajang sudah ditegaskan dalam SK Kemenkumham tersebut di atas.

Jajang juga mengungkapkan visi PDSI yakni menjadi pelopor reformasi kedokteran Indonesia yang menjunjung tinggi kesejahteraan, serta berlawanan Indonesia untuk dunia demi meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Adapun misi organisasi ini ada tiga. Pertama, mengayomi dokter dengan bersinergi bersama rakyat dan pemerintah dengan membentuk organisasi yang profesional. Kedua, meningkatkan taraf kesehatan rakyat Indonesia dan kesejahteraan anggota. Ketiga, mendorong

inovasi anak bangsa di bidang kesehatan berlawanan Indonesia untuk dunia.

"Semoga PDSI berkontribusi dalam dunia kesehatan pada umumnya, dan dunia kedokteran pada khususnya. Tentunya kami juga mengharapkan dukungan dari segenap pihak, khususnya rakyat Indonesia yang menjadi tujuan utama panggilan profesi kami

ini. Karena kami juga rakyat Indonesia, maka PDSI adalah dari, oleh, dan untuk rakyat," katanya. Selama ini Jajang dikenal sebagai staf khusus Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Jajang berkarier sebagai dokter militer dan tergabung dalam corps kesehatan militer (CKM).

Dia pernah menjabat sebagai Direktur Pembinaan

dan Penunjang Umum Rumay Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto.

Saat dikonfirmasi perihal hubungan PDSI dengan Terawan, Jajang belum memberikan jawaban. Kompas.com telah mencoba menghubungi Jajang secara langsung dan juga pihak Terawan. Hingga berita ini dituliskan, belum ada jawaban dari keduanya. • han

Aneh, Hakim Jadikan BAP Polisi Alat Bukti Kasus Begal Salah Tangkap

JAKARTA (IM) - Tim advokasi anti-penyiksaan yang terdiri dari perwakilan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyoro vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Cikarang, terhadap 4 terdakwa kasus begal salah tangkap di Tambelang, Bekasi.

Dalam menjatuhkan vonis,

majelis hakim justru mengakui dan menyatakan keterangan di luar pengadilan sebagai alat bukti yang sah. Keterangan di luar pengadilan itu berupa berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan atas nama para tersangka dan saksi.

"Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah apa yang ia nyatakan di muka persidangan," kata Kepala Divisi Hukum KontraS Andi Muhammad Rezaldi dalam keterangan tertulis, Rabu (27/4).

Pemakaian BAP penyidikan sebagai alat bukti dianggap semakin absurd, sebab investigasi yang dilakukan Komnas HAM menemukan bahwa terjadi serangkaian penyiiksaan oleh polisi sebelum dan selama BAP. Temuan ini sudah dirilis Komnas HAM sejak 20 April 2022.

"Terlebih, terungkap fakta dalam persidangan bahwa para terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dan mengalami serangkaian penyiiksaan oleh anggota Polsek Tambelang dan Polres Metro Bekasi," kata Andi.

"Sehingga BAP tersebut tidak layak dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan," imbuhnya.

Di samping itu, Kontras dan LBH Jakarta juga menyoro diadakannya keterangan

saksi verbalisan yaitu penyidik pembantu yang memeriksa para terdakwa. Andi menjelaskan, keabsahan keterangan saksi verbalisan telah dikesampingkan dalam berbagai putusan pengadilan, karena tidak memiliki kekuatan pembuktian lantaran konflik kepentingan dengan perkara.

Sebagai informasi, majelis hakim menjatuhkan pidana 10 bulan penjara kepada terdakwa Abdul Rohman, dan pidana 9 bulan penjara kepada M. Fikry, M. Rizky, dan Randi Apriyanto. Sebelumnya, keempat terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (2) ke-2 dengan ancaman pidana penjara 12 tahun.

Investigasi Komnas HAM dan media massa menemukan berbagai dokumentasi bahwa keempat pemuda itu tidak ada di lokasi pembegalan pada 24 Juli 2021 dini hari. Mereka terpaksa mengakui pembegalan yang dituduhkan lantaran berada di bawah ancaman dan penyiiksaan polisi, baik ketika penangkapan maupun penyiiksaan.

Penangkapan pada 28 Juli 2021 itu pun diduga kuat sarat pelanggaran prosedur, mulai dari tidak ditunjukkan surat penangkapan, hingga dibawanya para pemuda itu oleh polisi ke kantor perusahaan pelat merah selama 7 jam lebih sebelum ke kantor polisi. • han

Andika Tegaskan Beasiswa Calon Taruna Tak Ada Lewat Jalur Tol

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bertemu dengan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo. Keduanya membahas penerimaan calon prajurit TNI.

Andika menegaskan beasiswa calon taruna dan bintang tidak ada lewat jalur tol atau khusus. Semua warga negara Indonesia berhak mendaftar masuk prajurit TNI.

"Jadi program beasiswa itu tidak kemudian mendapatkan

jalur tol, sama sekali tidak. Jangankan kemudian yang beasiswa tahu-tahu dapat prioritas, nggak boleh kita harus fair," ujar Andika Perkasa dilansir dari Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa, Rabu (27/4).

Dikatakan Andika, semua warga negara berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk masuk ke Akademi Angkatan Udara (AAU).

"Ingat, mereka-mereka yang bisa masuk TNI adalah warga negara Indonesia. Termasuk untuk ditingkat AAU nanti itu sumbernya dari mana, ngga ada yang spesial," kata mantan KSAD itu.

Dia juga mengingatkan KSAU bahwa tidak ada prioritas bagi lulusan SMA manapun. Semua berhak menjadi perrwira TNI AU melalui jalur AAU. "Kita hanya melihat hasil selesinya titik," tegasnya. • han

Table with 3 columns: No, Keterangan, Status. PT CENTURY DINAMIK DRILLING (DALAM LIKUIDASI). 1. Aset Perseroan: Tidak Ada. 2. Kewajiban Perseroan: Tidak Ada. 3. Pembagian Dividen Kepada Para Pemegang Saham: Tidak Ada.

J TRUST BANK PENGUMUMAN. Bersama ini, kami sampaikan bahwa PT Bank JTrust Indonesia, Tbk akan melaksanakan kegiatan operasional pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 di Kantor Pusat PT Bank JTrust Indonesia, Tbk dengan penjelasan bahwa kegiatan dimaksud:

Financial reports for PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk. Includes: LAPORAN POSISI KEUANGAN, LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, LAPORAN ARUS KAS, LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS. Tables showing data for 2021 and 2020.

Financial reports for PT SURYA PERMATA ANDALAN Tbk. Includes: LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN, LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN, LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN, LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN. Tables showing consolidated data for 2021 and 2020.

Kantor Pusat: Jln. Sarinande No. 20, Bali - Indonesia. Tel: (0361) 738163. Fax: (0361) 731652. Email: admin@suryapermataandalan.co.id. Website: www.suryapermataandalan.co.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER MENGENAI PEMUBARAN PT INSITE MEDIA Berdasarakan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Insite Media tanggal 12 April 2022, sebagaimana diumut dalam Akta Pemutakhiran Keputusan Sirkuler Mengenai Pemubaran PT Insite Media No. 11 tanggal 25 April 2022 Para Pemegang Saham PT Insite Media (Dalam Likuidasi) ("Perseroan") telah menyelesaikan pemutakhiran Perseroan dan diikuti dengan likuidasi serta mengangkat Nyoman Oka Bakti Artawan, S.H., M.H. dan Putu Aditya P., S.H., M.H. sebagai likuidator ("Tim Likuidator").

PENGUMUMAN. Sesuai dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LEO JAYA TRANS tanggal 27 April 2022 Nomor 10 yang dibuat oleh HERNAN GUNAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, maka tertanggal sejak tanggal 27 April 2022 Perseroan telah dibubarkan.